



FSPPB

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU

Anggota : SPP UPms I Medan - SP KMPT RU. II Dumai - SPPSI UPms I Tj. Uban - SPP RU. III Plaju - SP3N SBS UPms II Palembang - SPPSI Jakarta - SP FKPPA Jakarta - SPP UPms III Jakarta - SP PBB RU. VI Balongan - SPP PWK RU. IV Cilacap - SP Persada UPms IV Semarang - SPP Sepuluh Nopember Surabaya - SP Mathilda Kalimantan - SP Celebes UPms VII Makassar - SP KTI RU. VII Kasim - SP Pertamina EP Jakarta - SP Pertamina Geothermal Energy Jakarta - SP Mutiara Jayapura - SP Pertamina Gas - SP PDSI - SP Pertamina Lubricant - SP TPPI Tuban - SP Pertamina Hulu Rokan - SP Nusantara Regas - SP Pertamina Patra Niaga

Jakarta, 21 November 2024

Nomor : 398/FSPPB/XI/2024-TH%

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : **Rekomendasi Tata Kelola Pertamina untuk Mendukung Swasembada dan Kedaulatan Energi Nasional**

Kepada Yang Terhormat :

Presiden Republik Indonesia

Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Dengan hormat,

Kami, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), mengucapkan doa dan harapan terbaik kepada Bapak Presiden, semoga Bapak dan keluarga selalu berada dalam lindungan Allah SWT, serta diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, bersama Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka dan seluruh Kabinet Merah Putih. Kami berharap Bapak dapat membawa bangsa Indonesia menuju kemajuan, terutama dalam mencapai swasembada energi, pangan, serta berbagai sektor lainnya. Aamiin Yaa Robbal Alamiin. Kami juga merasa bangga memiliki pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap kebangsaan dan jiwa patriotik.

Sebagai induk organisasi dari 25 Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina, FSPPB ingin menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Bapak dalam mewujudkan tujuan Asta Cita, khususnya dalam program swasembada energi dan kedaulatan energi nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menggarisbawahi pentingnya kemandirian energi Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, FSPPB mengusulkan agar tata kelola Pertamina diubah menjadi lebih terpadu untuk memperkuat peran strategisnya dalam ketahanan energi

Member Of KSPMI



Sekretariat :
Gedung Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Lt.7
Jl. Medan Merdeka Timur No.06 Gambir, Jakarta 10110
Telepon (021) 3815413 - 3815873
Faksimili (021) 3816034
Email : sekretariat.fsppb@pertamina.com



FSPPB

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU

Anggota : SPP UPms I Medan - SP KMPT RU. II Dumai - SPPSI UPms I Tj. Uban - SPP RU. III Plaju - SP3N SBS UPms II Palembang - SPPSI Jakarta - SP FKPPA Jakarta - SPP UPms III Jakarta - SP PBB RU. VI Balongan - SPP PWK RU. IV Cilacap - SP Persada UPms IV Semarang - SPP Sepuluh Nopember Surabaya - SP Mathilda Kalimantan - SP Celebes UPms VII Makassar - SP KTI RU. VII Kasim - SP Pertamina EP Jakarta - SP Pertamina Geothermal Energy Jakarta - SP Mutiara Jayapura - SP Pertamina Gas - SP PDSI - SP Pertamina Lubricant - SP TPPI Tuban - SP Pertamina Hulu Rokan - SP Nusantara Regas - SP Pertamina Patra Niaga

-2-

Surat No. 398/FSPPB/XI/2024-TH%

Sehubungan dengan hal tersebut, FSPPB mengusulkan agar tata kelola Pertamina diubah menjadi lebih terpadu untuk memperkuat peran strategisnya dalam ketahanan energi nasional dan mewujudkan swasembada energi. Berdasarkan kajian kami, terdapat beberapa perubahan dalam tata kelola Pertamina yang berdampak signifikan terhadap produksi migas dan ketersediaan energi nasional, sebagaimana tercermin dalam evaluasi berikut ini:

No	Periode	Status	Keunggulan	Tantangan
1	UU No. 8 Tahun 1971	Perusahaan Negara	Pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir, efisiensi operasional, kontrol negara	Peran ganda sebagai operator dan pengatur, pengawasan langsung di bawah Presiden, Pertamina mewakili Negara dalam kontrak B2B.
2	UU No. 22 Tahun 2001	Perseroan Terbatas (PT)	Transparansi, investasi asing meningkat	Penurunan kontrol penuh negara, BP Migas/SKK Migas mewakili negara dalam kontrak G2B, potensi privatisasi.
3	Saat Ini Holding - Subholding	Perseoran Terbatas (PT) dengan enam subholding	Fokus bisnis per subholding, lebih agile.	Kepemilikan negara terdelusi, terjadi IPO pada anak usaha dan perencanaan IPO/privatisasi di subholding, silo dan inefisiensi operasional.

Sejarah Pengelolaan Migas melalui Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang

Bapak Presiden yang kami hormati,

Pengelolaan sektor migas Indonesia dimulai dengan keluarnya berbagai peraturan yang menunjukkan betapa pentingnya sektor ini bagi kemajuan dan ketahanan ekonomi negara. Sejak awal pendirian Pertamina pada tahun 1957, pengelolaan minyak dan gas bumi Indonesia telah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Pengaturan ini diawali dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah No. 198 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1968, yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan sektor migas oleh negara.

Member Of KSPMI



Sekretariat :
Gedung Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Lt.7
Jl. Medan Merdeka Timur No.06 Gambir, Jakarta 10110
Telepon (021) 3815413 - 3815873
Faksimili (021) 3816034
Email : sekretariat.fsppb@pertamina.com



FSPPB

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU

Anggota : SPP UPms I Medan - SP KMPT RU. II Dumai - SPPSI UPms I Tj. Uban - SPP RU. III Plaju - SP3N SBS UPms II Palembang - SPPSI Jakarta - SP FKPPA Jakarta - SPP UPms III Jakarta - SP PBB RU. VI Balongan - SPP PWK RU. IV Cilacap - SP Persada UPms IV Semarang - SPP Sepuluh Nopember Surabaya - SP Mathilda Kalimantan - SP Celebes UPms VII Makassar - SP KTI RU. VII Kasim - SP Pertamina EP Jakarta - SP Pertamina Geothermal Energy Jakarta - SP Mutiara Jayapura - SP Pertamina Gas - SP PDSI - SP Pertamina Lubricant - SP TPPI Tuban - SP Pertamina Hulu Rokan - SP Nusantara Regas - SP Pertamina Patra Niaga

-3-

Surat No. 398/FSPPB/XI/2024-TH%

Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, Pertamina diposisikan sebagai perusahaan negara yang sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden RI, dengan pengelolaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. UU ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi Pertamina untuk menjalankan peran pentingnya dalam mengelola dan memproduksi migas nasional, serta sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia. Pada masa kejayaannya, Pertamina menjadi penopang utama ekonomi dan pembangunan nasional, mendirikan berbagai infrastruktur vital, sekolah, rumah sakit dan perusahaan-perusahaan yang penting bagi negara seperti Krakatau Steel, Bio Farma, serta berbagai sektor lain yang mendukung pembangunan negara.

Penerapan UU No. 22 Tahun 2001 yang mengubah Pertamina menjadi Perseroan Terbatas (PT) membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan migas, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan menarik investasi asing. Namun, hal ini juga mengurangi kontrol penuh negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang vital bagi keberlanjutan energi nasional.

Lebih lanjut, pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. 198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, dilakukan restrukturisasi Pertamina dengan pembentukan enam subholding, yaitu Subholding Upstream, Subholding Refining dan Petrochemical, Subholding Commercial and Trading, Subholding Gas, Subholding Integrated Marine Logistics, Subholding Power and New Renewable Energy. Restrukturisasi ini bertujuan untuk membuat Pertamina lebih agile dalam menghadapi dinamika pasar energi global. Namun, restrukturisasi ini juga membuka potensi besar terjadinya privatisasi di BUMN, yang dapat mengurangi kontrol negara terhadap perusahaan ini. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kedaulatan energi nasional dan memastikan agar Pertamina tetap berfungsi sebagai penggerak utama dalam menjaga ketahanan energi Indonesia.

Member Of KSPMI



Sekretariat :
Gedung Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Lt.7
Jl. Medan Merdeka Timur No.06 Gambir, Jakarta 10110
Telepon (021) 3815413 – 3815873
Faksimili (021) 3816034
Email : sekretariat.fsppb@pertamina.com



FSPPB

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU

Anggota : SPP UPms I Medan - SP KMPT RU. II Dumai - SPPSI UPms I Tj. Uban - SPP RU. III Plaju - SP3N SBS UPms II Palembang - SPPSI Jakarta - SP FKPPA Jakarta - SPP UPms III Jakarta - SP PBB RU. VI Balongan - SPP PWK RU. IV Cilacap - SP Persada UPms IV Semarang - SPP Sepuluh Nopember Surabaya - SP Mathilda Kalimantan - SP Celebes UPms VII Makassar - SP KTI RU. VII Kasim - SP Pertamina EP Jakarta - SP Pertamina Geothermal Energy Jakarta - SP Mutiara Jayapura - SP Pertamina Gas - SP PDSI - SP Pertamina Lubricant - SP TPPI Tuban - SP Pertamina Hulu Rokan - SP Nusantara Regas - SP Pertamina Patra Niaga

-4-

Surat No. 398/FSPPB/XI/2024-TH%

Usulan Struktur Pengelolaan Terpadu untuk Swasembada Energi

Bapak Presiden yang kami hormati,

Untuk mendukung visi Bapak Presiden dalam mewujudkan swasembada energi, kami mengusulkan agar status dan tata kelola Pertamina dikembalikan menjadi **Perusahaan Negara (PN)** atau **Perusahaan Umum (Perum)**. Struktur organisasi ini akan memiliki tiga direktorat utama yang terintegrasi: Hulu & Pengolahan (Migas dan Geothermal), Hilir dan Gas & Energi Baru Terbarukan (New & Renewable Energy/NRE)

Struktur ini akan memungkinkan Pertamina menjalankan fungsinya secara terpadu, memastikan efisiensi operasional, serta meningkatkan kapasitas dalam menjaga pasokan energi nasional. Usulan ini telah melalui berbagai forum diskusi dan kajian bersama, baik internal maupun dengan berbagai pihak, termasuk cendekiawan, ormas, LSM, mahasiswa, pengamat energi serta dengan IKAL Starectic Center - Lemhannas.

Keunggulan Pengelolaan Terpadu:

No	Keunggulan	Penjelasan	Tantangan
1	Kedaulatan Energi Nasional	Kendali penuh negara untuk menjamin pasokan energi, terutama dalam kondisi darurat	Diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
2	Efisiensi Operasional	Penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan respons terhadap kebutuhan nasional	ransisi kebijakan Investasi yang diperlukan.
3	Daya Saing dan Kemandirian	Meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor	Penyesuaian model bagi hasil untuk menarik investor.
4	Konsistensi dengan Regulasi Nasional	Mematuhi Putusan MK yang membubarkan BP Migas, mengembalikan kontrol penuh pada negara	Penyesuaian kontrak kerja sama yang sedang berlangsung

Struktur pada organisasi baru yang kami usulkan ini mencakup direktorat dengan koordinasi terpusat di bawah Presiden RI dan Direksi Pertamina. Struktur ini

Member Of KSPMI



Sekretariat :
Gedung Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Lt.7
Jl. Medan Merdeka Timur No.06 Gambir, Jakarta 10110
Telepon (021) 3815413 - 3815873
Faksimili (021) 3816034
Email : sekretariat.fsppb@pertamina.com



FSPPB

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU

Anggota : SPP UPms I Medan - SP KMPT RU. II Dumai - SPPSI UPms I Tj. Uban - SPP RU. III Plaju - SP3N SBS UPms II Palembang - SPPSI Jakarta - SP FKPPA Jakarta - SPP UPms III Jakarta - SP PBB RU. VI Balongan - SPP PWK RU. IV Cilacap - SP Persada UPms IV Semarang - SPP Sepuluh Nopember Surabaya - SP Mathilda Kalimantan - SP Celebes UPms VII Makassar - SP KTI RU. VII Kasim - SP Pertamina EP Jakarta - SP Pertamina Geothermal Energy Jakarta - SP Mutiara Jayapura - SP Pertamina Gas - SP PDSI - SP Pertamina Lubricant - SP TPPI Tuban - SP Pertamina Hulu Rokan - SP Nusantara Regas - SP Pertamina Patra Niaga

-5-

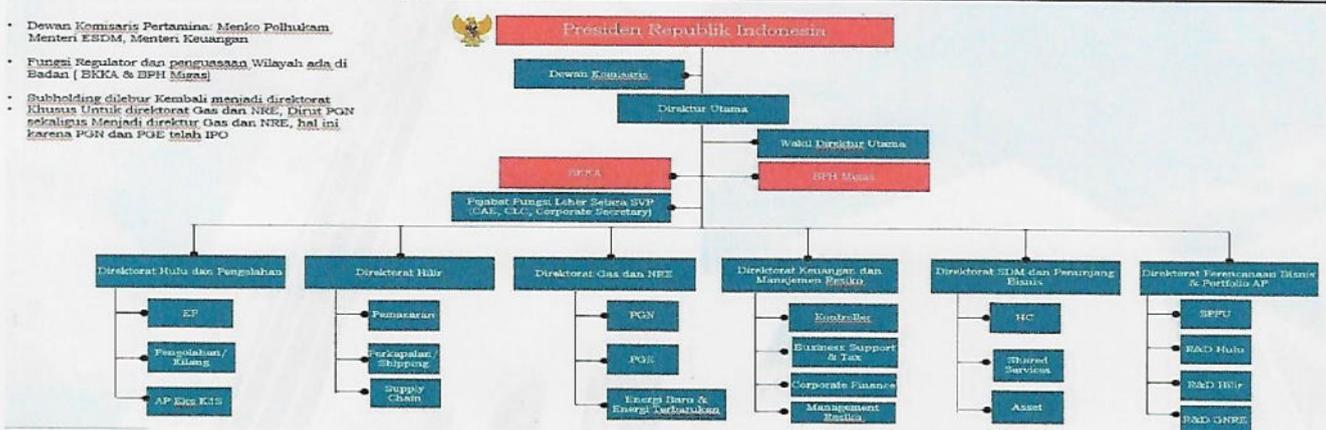
Surat No. 398/FSPPB/XI/2024-TH%

memungkinkan pengelolaan rantai pasok energi secara *end-to-end* guna memperkuat peran Pertamina sebagai penopang utama kedaulatan energi nasional. Jajaran direksi serta tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama – Mengoordinasikan seluruh aspek operasional Pertamina dengan dukungan Wakil Direktur Utama;
2. Direktorat Hulu dan Pengolahan – Menangani eksplorasi, produksi, dan kilang;
3. Direktorat Hilir – Mengelola distribusi, pemasaran, serta logistik maritim;
4. Direktorat Gas dan NRE – Fokus pada distribusi gas serta pengembangan energi terbarukan;
5. Direktorat Keuangan dan Manajemen Resiko;
6. Direktorat SDM dan Penunjang Bisnis ; dan
7. Direktorat Perencanaan Bisnis dan Portofolio Anak Usaha.

Serta adanya Badan Koordinasi Kontraktor Asing (BKKA) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang akan menjadi bagian dari pengejawantahan pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Struktur Organisasi Pertamina yang diajukan



Sebagai perbandingan, kami merujuk pada model pengelolaan National Oil Companies (NOC) yang sukses di beberapa negara, seperti Petrobras, British Petroleum (BP), dan Petronas. Model pengelolaan ini sepenuhnya berada di bawah pimpinan pemerintahan, dan

Member Of KSPMI



Sekretariat :
Gedung Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Lt.7
Jl. Medan Merdeka Timur No.06 Gambir, Jakarta 10110
Telepon (021) 3815413 – 3815873
Faksimili (021) 3816034
Email : sekretariat.fsppb@pertamina.com



FSPPB

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU

Anggota : SPP UPms I Medan - SP KMPT RU. II Dumai - SPPSI UPms I Tj. Uban - SPP RU. III Plaju - SP3N SBS UPms II Palembang - SPPSI Jakarta - SP FKPPA Jakarta - SPP UPms III Jakarta - SP PBB RU. VI Balongan - SPP PWK RU. IV Cilacap - SP Persada UPms IV Semarang - SPP Sepuluh Nopember Surabaya - SP Mathilda Kalimantan - SP Celebes UPms VII Makassar - SP KTI RU. VII Kasim - SP Pertamina EP Jakarta - SP Pertamina Geothermal Energy Jakarta - SP Mutiara Jayapura - SP Pertamina Gas - SP PDSI - SP Pertamina Lubricant - SP TPPI Tuban - SP Pertamina Hulu Rokan - SP Nusantara Regas - SP Pertamina Patra Niaga

-6-

Surat No. 398/FSPPB/XI/2024-TH%

telah terbukti efektif dalam mewujudkan kemandirian energi serta menjaga harga energi domestik.

Kesimpulan dan Harapan

Bapak Presiden yang kami hormati,

FSPPB meyakini bahwa dengan integrasi dan pengelolaan penuh Pertamina di bawah kendali Presiden, tujuan swasembada energi yang Bapak cita-citakan dapat tercapai. Kami berharap Bapak dapat mempertimbangkan dan menyetujui usulan ini. Jika berkenan, kami siap untuk menjelaskan lebih lanjut dan beraudiensi langsung dengan Bapak Presiden beserta tim untuk langkah-langkah selanjutnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Presiden.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu

Presiden,

Arie Gumilar



Tembusan :

1. Pimpinan MPR RI
2. Pimpinan DPR RI
3. Pimpinan DPD RI
4. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam)
5. Menteri Keuangan
6. Menteri ESDM
7. Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
9. Ketua Umum Serikat Pekerja Konstituen FSPPB

Member Of KSPMI



Sekretariat :
Gedung Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Lt.7
Jl. Medan Merdeka Timur No.06 Gambir, Jakarta 10110
Telepon (021) 3815413 – 3815873
Faksimili (021) 3816034
Email : sekretariat.fsppb@pertamina.com



FSPPB

KAJIAN REKOMENDASI MASA DEPAN PERTAMINA

FSPPB
on the street





Transformasi Pertamina

Pertamina memiliki bentuk dan model terbaik pada era UU No. 8 Tahun 1971

UU No. 8 Tahun 1971



- Pertamina memiliki status sebagai **Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Milik Negara** dan berada di bawah pengawasan Pemerintah yaitu dengan kewajiban untuk melakukan :
 - Eksplorasi dan Produksi Migas
 - Pengolahan dan Kilang
 - Distribusi dan Pemasaran
- Pertamina merupakan **end-to-end company** dengan kekuasaan atas seluruh bisnis migas sektor hulu hingga hilir

Kekuatan Pertamina :

- Penguasaan Penuh** : Pertamina memiliki penguasaan penuh dalam eksplorasi, produksi, pengolahan, dan distribusi minyak dan gas bumi di Indonesia.
- Peran Ganda** : Pertamina berfungsi sebagai operator dan regulator dalam industri minyak dan gas bumi. Ini berarti Pertamina tidak hanya menjalankan operasi tetapi juga mengatur industri tersebut.

UU No. 22 Tahun 2021



Regulator



Operator

- Pertamina memiliki **status sebagai Perseroan Terbatas**
- Kompetisi dan Privatisasi** : UU membuka sektor minyak dan gas bumi untuk kompetisi dan investasi asing. Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya pemain di industri ini
- Pemecahan Fungsi** : Fungsi regulator dan operator dipisahkan.
- Pemerintah membentuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (**BPH Migas**) dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (**BP Migas**) untuk mengatur industri ini.

Struktur Pertamina Holding - Subholding



- Status anak perusahaan Pertamina** menjadi perusahaan swasta yang sangat rentan untuk di privatisasi





Perbandingan Pertamina Dari Masa ke Masa

Arah perkembangan yang **melemahkan kedaulatan energi Indonesia**

Kategori	UU No.8 /1971	UU No. 22 / 2001	Pertamina Holding - Subholding
Bentuk	Perusahaan Negara	Perseroan Terbatas	Perseroan Terbatas dengan Holding – Subholding
Pengaturan Operator – Regulator	Pertamina sebagai Regulator dan Operator	Pertamina sebagai Operator, BP Migas/SKK Migas sebagai Regulator	Pertamina sebagai Operator, BP Migas/SKK Migas sebagai Regulator
Pendapatan Negara	Pendapatan Pertamina adalah Pendapatan Negara (Pajak ada namun besarnya sangat kecil, hanya PPn yang dibayarkan 1 kali di akhir transaksi)	Pendapatan Pertamina tidak semuanya adalah pendapatan negara, pendapatan negara berasal dari Pajak, Dividen, dan Bea. Tidak terdapat pajak antar transaksi karena semua bisnis terintegrasi di bawah Pertamina (Persero)	Pendapatan Pertamina tidak semuanya adalah pendapatan negara, pendapatan negara berasal dari Pajak, Dividen, dan Bea. Terdapat pajak transaksi antar subholding
Pengelolaan WK Eksplorasi	Perusahaan lebih mudah di dalam pengelolaan WK Eksplorasi (dapat dikelola langsung oleh Pertamina, atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga)	Pengelolaan WK Eksplorasi harus melalui proses tender, Pertamina diperlakukan setara dengan KKKS lain	Pengelolaan WK Eksplorasi harus melalui proses tender, Pertamina diperlakukan setara dengan KKKS lain
Kedaulatan Energi	Negara menguasai seluruh sumber, pengelolaan, dan pendistribusian energi di Indonesia melalui Pertamina sesuai amanat UUD 1945 , pihak asing yang ingin ikut dalam proses ini harus bekerjasama dengan Pertamina sebagai Perusahaan Negara.	Negara secara tidak langsung membuka kesempatan kepada pihak swasta (dalam negeri / asing) untuk menguasai sebagian sumber, pengelolaan, dan pendistribusian energi di Indonesia tanpa melibatkan Pertamina sebagai BUMN.	Negara secara tidak langsung memberi lebih banyak kemudahan kepada pihak swasta (dalam negeri / asing) untuk menguasai sebagian sumber, pengelolaan, dan pendistribusian energi di Indonesia tanpa melibatkan Pertamina sebagai BUMN.
Policy Direction	Langsung dari Presiden	Berasal dari Menteri BUMN, ESDM, dan Menteri Keuangan	Berasal dari Menteri BUMN, ESDM, dan Menteri Keuangan





Pokok Pikiran Rekomendasi FSPPB, Pertamina sebagai Perusahaan Negara

Pertamina sebagai perusahaan Negara yang dibentuk oleh UU atau Perum, dan berada langsung dibawah Presiden

Pertamina sebagai perusahaan Negara yang dibentuk oleh UU atau Perum,

Dengan 3 Direktorat utama : Hulu (Migas dan Pengolahan), Hilir, dan Gas & NRE serta memiliki fungsi sebagai Operator dan Regulator,

Berada langsung dibawah Presiden
(Mengeluarkan Perppu pendirian PN Pertamina)

No	PRO	CON
1	Pemerintah akan lebih mudah dalam mewujudkan kedaulatan energi dan swasembada energi melalui Perusahaan Negara yang dibentuk oleh Perppu	Tidak lagi tunduk kepada UU no.22 tahun 2001 yang dilanjutkan oleh PP no.31 tahun 2003 tentang pengalihan struktur perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara menjadi perusahaan persero, sehingga perlu ada perubahan regulasi (yaitu mengeluarkan Perppu).
2	Negara memiliki penguasaan terhadap sumber daya energi melalui perusahaan yang dikuasai 100% oleh negara sesuai Pasal 33 UUD 1945	Diperlukan skema peralihan pada kontrak kerjasama pengelolaan wilayah Hulu Migas yang sedang berjalan.
3	Proses transisi akan lebih mudah dikarenakan struktur organisasi baru bersifat lebih fleksibel dan adaptif tanpa mengganggu operasional eksisting	Ketertarikan investor untuk berinvestasi di bidang Energi menjadi berkurang / menurun yang dikompensasi dengan skema bagi hasil yang lebih menarik. Diperlukan beberapa opsi skema bagi hasil sesuai dengan potensi dan risiko discovery cadangan energi untuk menarik minat investor.
4	Pemerintah dapat memaksimalkan peran Pertamina sebagai penyangga utama cadangan energi nasional apabila Negara dalam keadaan darurat (Staatsnoodrecht).	Potensi penurunan Penerimaan Pajak Pegara, namun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat.
5	Kontrak Perjanjian kerjasama yang saat ini B-G (Business to Government) menjadi B – B (Business to Business).	
6	Total asset negara akan meningkat karena asset pertamina dapat dimasukkan dalam pencatatan asset negara	
7	Efisiensi operasional dikarenakan penyederhanaan birokrasi dan hirarki.	
8	Keterjaminan supply chain dikarenakan integrasi menyeluruh dari semua aspek hulu – hilir.	
9	Negara konsisten terhadap putusan MK terkait pembubaran BP Migas yaitu Putusan Nomor 36/PUU-X/2012	

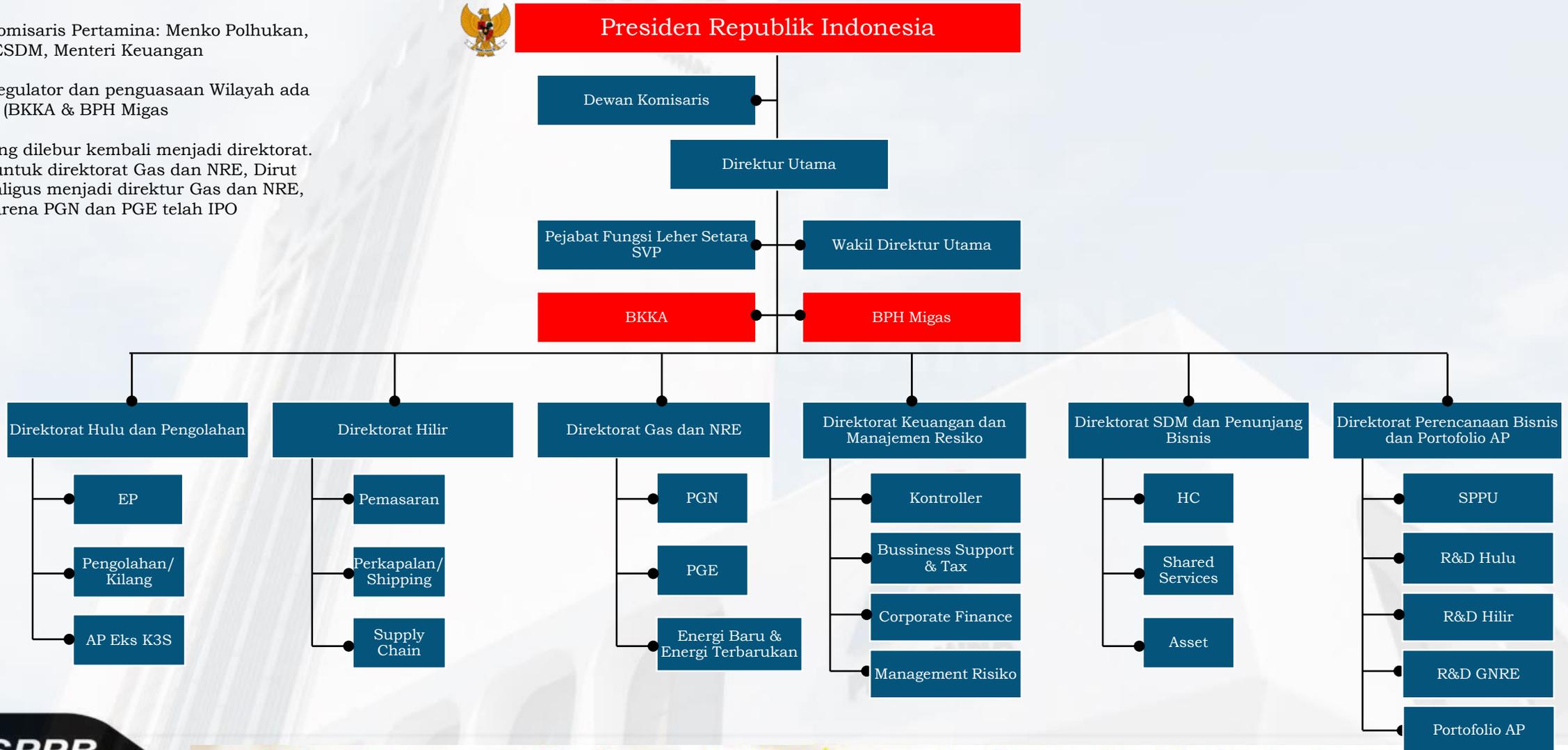




Struktur Organisasi Pertamina yang diajukan

Dewan Komisaris : Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri

- Dewan Komisaris Pertamina: Menko Polhukam, Menteri ESDM, Menteri Keuangan
- Fungsi Regulator dan penguasaan Wilayah ada di Badan (BKKA & BPH Migas)
- Subholding dilebur kembali menjadi direktorat. Khusus untuk direktorat Gas dan NRE, Dirut PGN sekaligus menjadi direktur Gas dan NRE, hal ini karena PGN dan PGE telah IPO





**Memimpin seluruh kegiatan perusahaan
sesuai visi misi perusahaan**



**Memimpin Board of Directors dalam
melaksanakan keputusan direksi**



**Menentukan keputusan yang
diambil dalam Rapat Direksi**



**Memberikan informasi kepada stakeholders terhadap keputusan
direksi yang memberikan dampak besar kepada publik baik yang
berkaitan dengan keputusan bisnis, aspek legal, ataupun isu-isu
tentang perusahaan yang berkembang di masyarakat**

DIREKTUR UTAMA



WAKIL **DIREKTUR UTAMA**

Dukungan Strategis

Mendukung Direktur Utama dalam pelaksanaan strategi korporasi dan pengawasan operasional seluruh subholding dan anak perusahaan

Koordinasi Divisi

Sebagai penghubung antar divisi, membantu koordinasi sumberdaya & memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif

Pengelolaan Risiko

Terlibat dalam pengelolaan risiko, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan strategis

Koordinasi Operasional

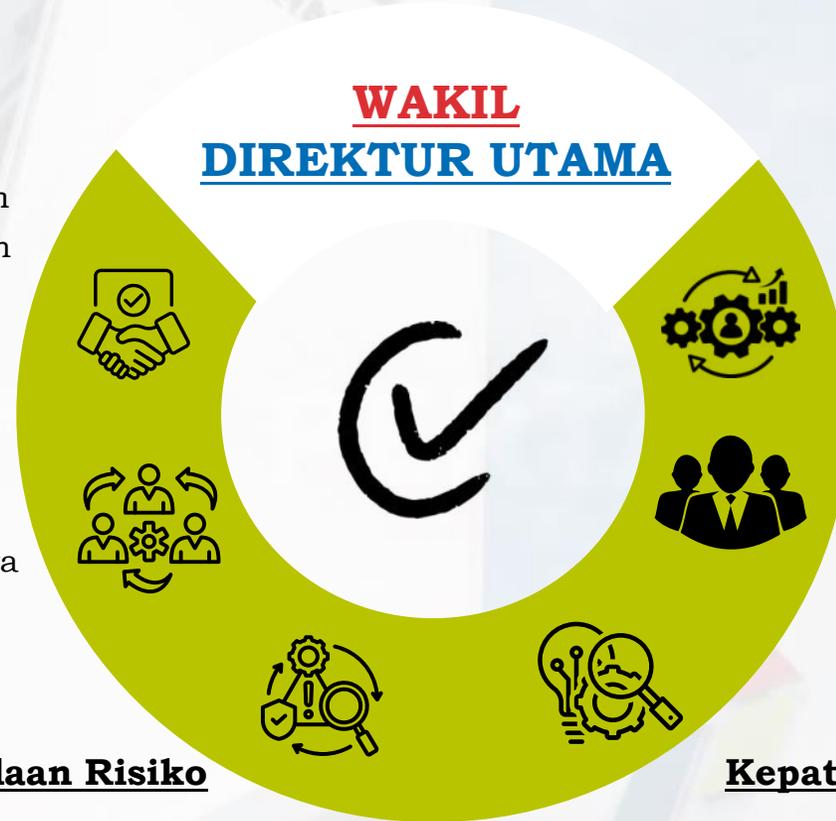
Mengkoordinir operasional seluruh anak perusahaan.

Pengembangan SDM

Mendukung pengembangan sumberdaya manusia dan inovasi di seluruh entitas perusahaan

Kepatuhan & Tata Kelola

Berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi serta memastikan tata kelola yang baik





DIREKTUR HULU DAN PENGOLAHAN

Mengembangkan dan melaksanakan strategi menemukan cadangan dan produksi migas melalui kegiatan pemboran, optimasi sumur, peningkatan/perawatan fasilitas produksi dan optimalisasi sumber daya lainnya.



Strategi Eksplorasi & Poduksi

Membangun kemitraan dengan perusahaan migas nasional dan internasional (NOC dan IOC) untuk memperluas eksplorasi dan berbagi risiko serta biaya.



Kemitraan Strategis

Mengelola proses pengolahan minyak dan gas untuk mencapai target monetisasi dan memenuhi kebutuhan bahan bakar nasional.



Pengolahan Energi

Operasional Hulu



Bertanggung jawab atas eksplorasi dan produksi minyak dan gas (domestik / internasional), untuk mencapai target produksi & pengembangan wilayah baru.

Teknologi Eksplorasi & Produksi



Memanfaatkan teknologi terbaru, seperti seismik, pemboran, optimasi sumur, EOR, dan teknologi lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penemuan cadangan dan peningkatan produksi.

Fungsi Regulator



Mengawasi BKKA untuk meningkatkan kemampuan eksplorasi dan produksi demi mencapai target produksi nasional.

Profitabilitas Kilang



Mengoptimalkan profitabilitas kilang dan petrokimia, mempercepat proyek strategis untuk mendukung ketahanan energi.



DIREKTUR HILIR



Meningkatkan digitalisasi dan otomatisasi proses bisnis hilir serta distribusi energi guna meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar global



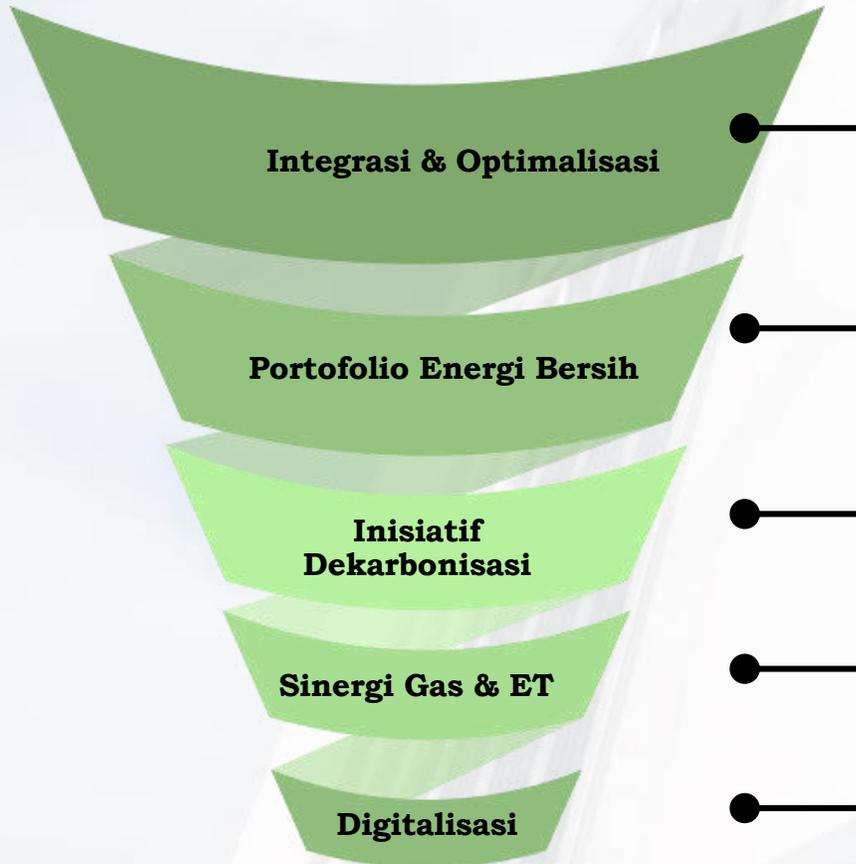
Mengembangkan strategi komersial untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga ketersediaan energi.



Memimpin pemasaran, distribusi, dan pengapalan minyak serta produk petrokimia untuk pasar domestik dan internasional, menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan bisnis.



DIREKTUR GAS DAN ENERGI TERBARUKAN



Memimpin integrasi dan optimalisasi distribusi gas, LNG, dan CNG, fokus pada infrastruktur dan efisiensi operasional untuk pasar domestik dan internasional.

Mengelola portofolio energi bersih (geothermal, solar, hidro, biomassa) guna mencapai kapasitas 10 GW energi terbarukan pada 2026.

Mendorong inisiatif dekarbonisasi melalui proyek *gas-to-power* dan pengembangan hidrogen hijau untuk mencapai *Net Zero Emission* pada 2060.

Mengawasi sinergi antara gas dan energi terbarukan untuk mendukung efisiensi operasional serta peran Pertamina dalam transisi energi global.

Mengembangkan digitalisasi dan otomasi rantai pasokan gas dan energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.



DIREKTUR KUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Keuangan

Memimpin pengembangan kebijakan keuangan & pelaporan untuk meningkatkan kinerja dan peringkat perusahaan



Strategi Risiko

Mengarahkan strategi manajemen resiko di seluruh grup sesuai peraturan dan keputusan RUPS

Strategi Pendanaan

Menyiapkan strategi pendanaan dan investasi, serta mengelola keuangan untuk menciptakan nilai optimal



Kebijakan Risiko

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan resiko yang sejalan dengan visi, misi, dan regulasi

Manajemen Keuangan

Mengelola keuangan secara efektif dan memastikan pelaporan sesuai standar akuntansi terbaik



Pengawasan Tata Kelola

Mengawasi tata kelola, pengendalian internal, dan manajemen resiko perusahaan



DIREKTUR SDM DAN PENUNJANG BISNIS



Pengembangan Kebijakan

Memimpin pengembangan kebijakan SDM yang mendukung pengembangan organisasi dan bisnis grup



Pengembangan Talent

Mengelola dan mengembangkan talent, infrastruktur, dan human capital untuk mendukung strategi bisnis dan meningkatkan produktivitas



Strategi Aset

Mengembangkan strategi dan pengelolaan aset penunjang agar lebih efisien dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.



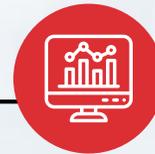
Shared Services

Mengelola proses bisnis yang berkaitan dengan proses operasional di tower finance, human capital, teknologi, procurement pengelolaan data untuk meningkatkan proses otomatisasi dan digitalisasi



Manajemen Kualitas

Mengelola quality management, sistem, dan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan



Sentralisasi Procurement

Mengelola, mengoptimalkan, dan mensentralisasi proses procurement komoditas bersama di seluruh pertamina grup

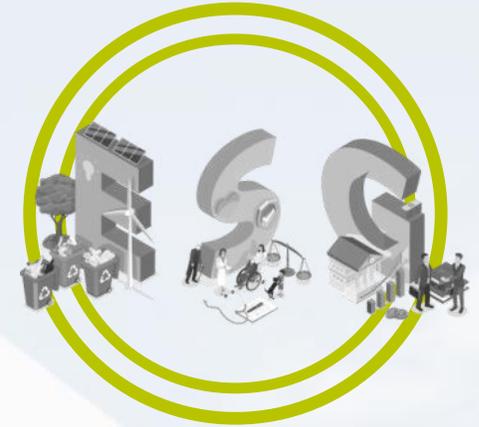


DIREKTUR PERENCANAAN BISNIS DAN PORTOFOLIO AP



Mengkaji dan mengevaluasi rencana investasi/divestasi serta mengoptimalkan sinergi dan pengembangan bisnis di sepanjang rantai nilai grup, termasuk pengelolaan kinerja portofolio dan kemitraan

Memimpin pengembangan strategi, kebijakan, dan masterplan bisnis grup untuk menjadi acuan sasaran kerja jangka pendek, menengah, dan panjang



Mengembangkan strategi inovasi teknologi terintegrasi dengan masterplan bisnis serta merumuskan strategi sustainability yang berorientasi pada aspek environmental, social, dan governance (ESG) untuk mendukung daya saing dan kelangsungan bisnis perusahaan





Perbandingan Struktur IOC dan NOC di negara lain

International Oil Company (IOC – Large Oil Company), National Oil Company (NOC – State Owned)

Petrobras (NOC)



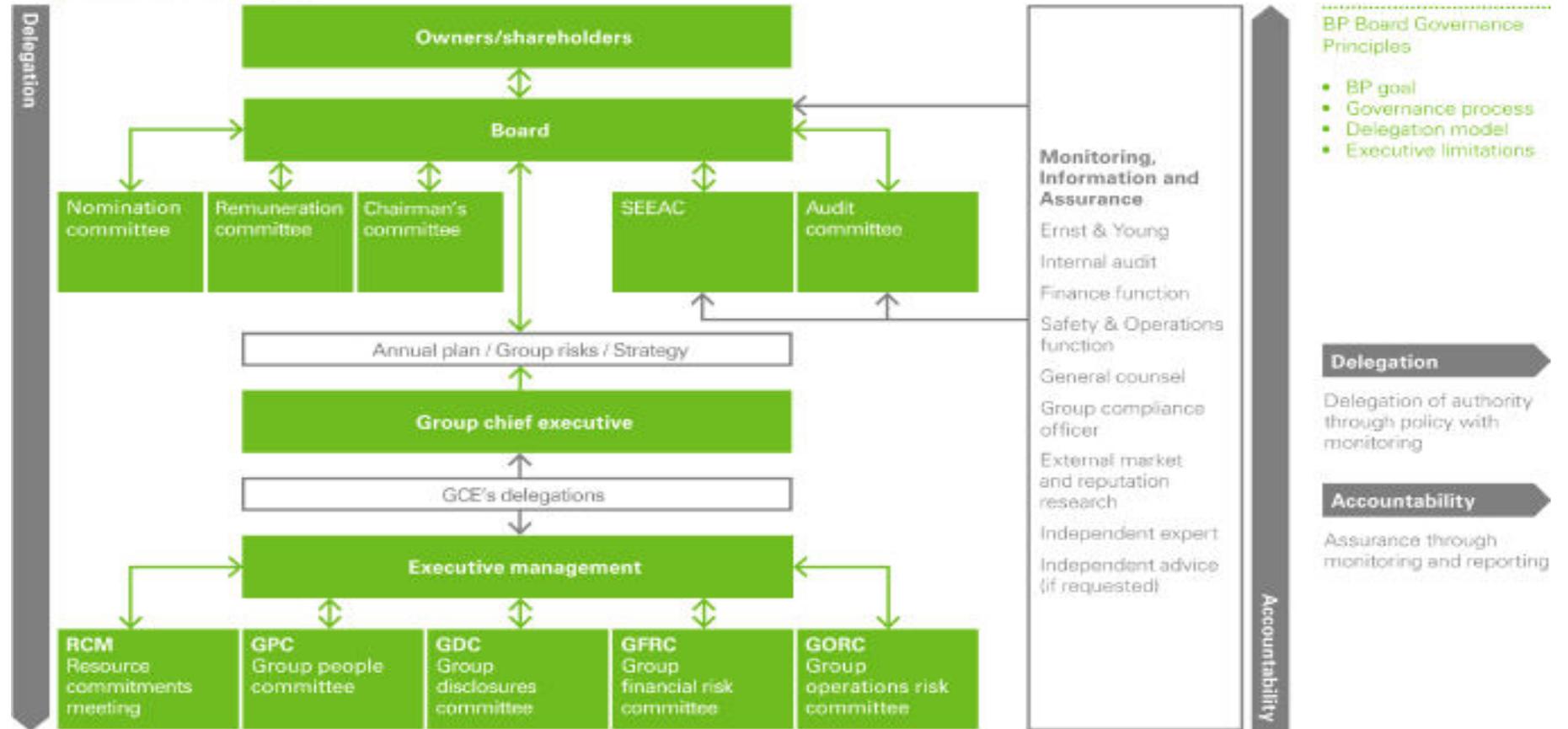


Perbandingan Struktur IOC dan NOC di negara lain

International Oil Company (IOC – Large Oil Company), National Oil Company (NOC – State Owned)

BP (IOC)

BP governance framework





Perbandingan Struktur IOC dan NOC di negara lain

International Oil Company (IOC – Large Oil Company), National Oil Company (NOC – State Owned)

PETRONAS (NOC)

